

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) MANGROVE

Wina Sarlina^{1*}, Nurul Khotimah¹

¹*Program Studi Agribisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia*

*Penulis korespondensi: winasarlinafile2024@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dalam memberdayakan masyarakat di Kelompok Tani Hutan Mangrove yang terletak di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam pemanfaatan bantuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara anggota KTH dan Penyuluh Kehutanan, observasi langsung di lapangan, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bantuan usaha ekonomi produktif di KTH Mangrove efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat diukur dari tiga indikator. Indikator kelola kelembagaan mendapatkan nilai 40,75, kelola usaha dengan skor 42,8 dan Kelola kawasan dengan skor 42. Bantuan yang diberikan berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan anggota, memperkuat kelembagaan kelompok dan meningkatkan kesadaran anggota mengenai pentingnya Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. Dalam pelaksanaannya, kendala program bantuan ini adalah keterbatasan mendapatkan bahan baku yang bersifat musiman, meningkatnya biaya produksi, serta ketergantungan kelompok terhadap pemerintah dalam penyediaan sarana pendukung usaha. Bantuan usaha produktif pada KTH Mangrove dalam jangka waktu empat tahun telah berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Namun, peran penyuluh pendamping diperlukan untuk meningkatkan kemandirian kelompok dan memberdayakan anggota.

Kata kunci : efektivitas program, kawasan konservasi, kelompok tani hutan, pemberdayaan masyarakat, usaha ekonomi produktif.

1. PENDAHULUAN

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Kehutanan yang memiliki tujuh unit kawasan konservasi yang berada di Provinsi Jambi. Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur merupakan salah satu kawasan konservasi yang secara administratif berada di kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan 15 desa penyangga yang sebagian besar berdampingan dengan pemukiman dan lahan masyarakat. Masyarakat di desa penyangga memiliki pengaruh yang besar terhadap eksistensi kawasan konservasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap kawasan cagar alam dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kelestarian ekosistem. Sehingga dilakukan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian kawasan konservasi.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya menguatkan kelembagaan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial berkelanjutan

(Mustanir et al., 2023). Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dilakukan melalui pembentukan kelompok tani hutan dan pemberian bantuan usaha ekonomi produksi. Salah satu sasarannya adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mangrove di Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk pada tahun 2022 dan mendapatkan program bantuan dalam tahun yang sama. Program bantuan yang diberikan berupa dukungan pengembangan usaha kerupuk udang. Dukungan pengembangan usaha ini sesuai dengan pendapat Elwardah & Fryanti, (2023) yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan usaha pengelolaan hasil perikanan sebagai sumber daya utama masyarakat sekitar. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat terhadap perlindungan kawasan konservasi.

Partisipasi masyarakat di desa penyangga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan di Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur masih cenderung pasif dan bergantung pada dorongan pihak luar (Junwalki et al., 2025). Galvanis et al.,(2024) menyatakan bahwa strategi pengelolaan mangrove perlu menekankan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Selain itu, pengembangan usaha berbasis mangrove, peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah serta kerja sama antar pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan mangrove berkelanjutan (Galvanis et al., 2024)

Dalam suatu program pemberdayaan, ketepatan sasaran bantuan, tingkat partisipasi anggota, serta keberlanjutan pembinaan mempengaruhi keberhasilan (Annisa & Syafril, 2025). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan seperti aspek ekonomi, sosial budaya, teknologi dan digitalisasi, pemerintahan, lingkungan, serta mentalitas masyarakat itu sendiri (Nurmayanti et al., 2025). Bantuan usaha ekonomi produktif telah diberikan dalam masa empat tahun. Namun tingkat keberhasilan program tersebut dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat belum terukur secara pasti. Selain itu, kendala yang dihadapi anggota dalam memanfaatkan bantuan belum teridentifikasi secara menyeluruh.

Penelitian Lillah Zulfidda et al., (2024) menunjukkan bahwa program seperti kemitraan konservasi di Taman Nasional Meru Betiri memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan petani dan dari aspek sosial mampu meningkatkan kekompakan petani dalam menjaga kawasan konservasi dan memperkuat komunikasi antar anggota melalui pertemuan kelompok. Namun, belum ada penelitian yang khusus mengevaluasi program bantuan ekonomi produktif yang diberikan oleh BKSDA Jambi kepada KTH Mangrove di Kelurahan Nipah Panjang I sebagai desa Penyangga Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas program bantuan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pemberdayaan anggota kelompok dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan bantuan tersebut.

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2026 di Kelompok Tani Hutan Mangrove Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. KTH ini merupakan salah satu dari 19 KTH binaan BKSDA Jambi yang menerima program bantuan usaha ekonomi produktif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif evaluatif dengan pendekatan kuantitatif. Didukung uraian kualitatif guna menggambarkan secara mendalam program bantuan usaha ekonomi produktif di KTH Mangrove dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara menggunakan skala likert kepada 15 orang anggota KTH Mangrove dan wawancara mendalam kepada Penyuluh Kehutanan Seksi

Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III BKSDA Jambi. Selain itu dilakukan observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan kelompok. Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, jurnal ilmiah, buku, peraturan dan sumber lain yang dianggap sesuai. Sementara itu, kecerdasan buatan (AI) dipergunakan untuk keperluan *brainstorming* ide. Namun demikian, analisis, pembahasan hingga kesimpulan sepenuhnya dilakukan secara mandiri.

Pengukuran efektivitas program bantuan dilakukan dengan menggunakan teknik skoring. Setiap jawaban Ya diberi nilai 3, Cukup diberi nilai 2 dan Tidak diberi nilai 1. Selanjutnya dibuat penentuan kategori efektivitas dengan menggunakan interval kelas dengan interval skor 15-25 termasuk kategori tidak efektif, 26-35 masuk kategori cukup efektif dan 36-45 masuk kategori efektif. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui tingkat efektivitas program bantuan usaha ekonomi produktif terhadap pemberdayaan anggota KTH Mangrove. Dalam pengukuran efektivitas perlu adanya indikator (Idris et al., 2023). Indikator penilaian efektivitas bantuan kelompok terhadap pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan yaitu: Indikator kelembagaan, indikator usaha dan indikator kawasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Bantuan Ekonomi Produktif

3.1.1 Kelola Kelembagaan

Kelompok Tani Hutan Mangrove dibentuk pertama kali pada tahun 2022. Diketahui Ibu Nurcahaya, Ibu Ida Laila sebagai sekretaris dan ibu Yuliana sebagai Bendahara. Anggota kelompok terdiri dari 12 orang sehingga jumlah anggota keseluruhan 15 orang. Anggota merupakan pengusaha kerupuk udang yang berada di sekitar lingkup RT yang sama. 3 orang anggota lainnya berada di RT tetangga yang berjarak 1 km dari sekretariat KTH. Anggota kelompok berdomisili di Kelurahan Nipah Panjang I yang berbatasan langsung dengan kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. Pemilihan kelompok berdasarkan kriteria-kriteria penerima bantuan yang tertera pada peraturan terkait fasilitasi bantuan dimana kelompok harus berbatasan langsung dengan kawasan suaka alam atau memiliki interaksi langsung, memiliki legalitas sebagai kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa/Camat/Bupati, beranggotakan minimal 10 orang dan diprioritaskan kepada kelompok yang belum pernah menerima bantuan (Dirjen KSDAE, 2017)

Dalam aspek kelola kelembagaan, telah ada pembagian tugas dan peran serta tanggung jawab setiap pengurus KTH. Meski dalam hal ini pengurusan administrasi KTH dilakukan oleh ketua yang sebenarnya itu merupakan tanggung jawab sekretaris. Bendahara kelompok sudah sesuai tugas dan perannya dalam mengumpulkan dan mencatat kas masuk dan keluar kelompok. Administrasi kelompok yang dimiliki KTH Mangrove cukup lengkap dilihat dari papan sekretariat yang terpampang di rumah ketua kelompok, buku tamu, buku pencatatan iuran bulanan, buku pencatatan penjualan produk. Namun, dalam hal ini perlu dilakukan pendampingan kepada pengurus KTH untuk melengkapi administrasi kelompok yang belum ada.

Tabel 1. Hasil analisis Indikator Kelola Kelembagaan KTH Mangrove

No	Penyataan	Jawaban	Individu (Jumlah)	Persentase %
1	Anggota ikut memberikan pendapat saat rapat	Ya	4	27
		Cukup	8	53
		Tidak	3	20
		Total	15	100
2	Anggota ikut dalam kegiatan kelompok	Ya	15	100

		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
	Total		15	100
3	Anggota rutin membayar iuran kelompok	Ya	12	80
		Cukup	3	20
		Tidak	0	0
	Total		15	100
4	Kelompok membantu anggota dalam usaha	Ya	15	100
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
	Total		15	100

Sumber: Data diolah (2026)

Dalam peningkatan partisipasi anggota, berdasarkan hasil wawancara semua anggota ikut dalam kegiatan kelompok seperti dalam pertemuan kelompok. Dalam memberikan pendapat dan masukan 26% anggota aktif memberikan pendapat saat rapat dalam kelompok, 53% cukup sering memberikan pendapat dan sisanya 20% anggota menjadi pendengar dan tidak memberikan pendapat saat rapat. Partisipasi anggota dalam memenuhi perjanjian kelompok dapat dilihat dari ketepatan anggota membayar iuran kelompok setiap bulannya. Masih ada 20% anggota yang cukup rutin dalam membayar iuran kelompok, selebihnya anggota tercatat membayar iuran secara rutin setiap bulan. Alasan tersebut disebabkan kondisi jarak dari rumah anggota ke sekretariat cukup jauh dan kesibukan anggota dalam membuat kerupuk udang setiap hari sehingga membuat anggota menunda pembayaran. Semua anggota merasa bahwa kehadiran kelompok membantu dalam usaha kerupuk udang yang mereka tekuni. Hasil ini sejalan dengan penelitian Munthe & Astuti, (2024) bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kelompok, keterlibatan anggota dan pengurus kelompok menjadi indikator berjalannya suatu kelembagaan kelompok.

3.1.2 Kelola Usaha

Program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) diberikan sedikit berbeda dari bantuan usaha ekonomi produktif di beberapa kelompok binaan BKSDA Jambi lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibelanjakan oleh anggota secara langsung. Menurut Nasution & Satria (2025), bahwa program bantuan dinilai lebih efektif jika diberikan dalam bentuk tunai dibandingkan bantuan sosial lainnya. Namun, di KTH Mangrove bantuan usaha ekonomi produktif diberikan dalam bentuk sarana produksi. Bantuan usaha ini berjumlah Rp. 50.000.000,- terdiri dari sarana produksi usaha kerupuk seperti kompor gas, tabung gas 10 kg, baskom, blender, pisau, kukusan yang diberi ke 15 anggota. Selain itu, terdapat sarana lain berupa mesin penggiling dan mesin genset diberikan ke kelompok yang dipegang oleh salah satu anggota pemilik produksi usaha kerupuk lebih besar. Penyaluran bantuan dalam bentuk barang ini didasarkan pada hasil diskusi antara pendamping dan anggota KTH dalam rapat. Barang-barang tersebut diusulkan oleh anggota melalui proposal sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Bantuan yang dimanfaatkan oleh penerima sesuai kebutuhannya dinilai lebih efektif daripada sekedar tersalurkannya bantuan tersebut (Rafi'e et al., 2026).

KTH mangrove merupakan himpunan dari pengusaha UMKM kerupuk udang. Namun, implementasi bisnis UMKM tidak mudah karena keterbatasan modal dan teknologi (Gustina Hidayat, 2026). Melalui bantuan kelompok ini setiap anggota memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mendukung usaha kerupuk udang yang sebelumnya sudah mereka jalankan secara mandiri. Dalam perjanjian kelompok, anggota diwajibkan membayar iuran sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan sebagai kas kelompok dan disarankan menggunakan logo KTH Mangrove pada label produk. Dalam segi pemasaran usaha, setiap

anggota memasarkan produk masing-masing. Karena setiap anggota sudah memiliki pelanggan yang membeli langsung produk mereka baik dari kelurahan, kecamatan, provinsi hingga ke Malaysia.

Tabel 2. Hasil analisis Indikator Kelola Usaha KTH Mangrove

No	Pernyataan	Jawaban	Individu (jumlah)	Persentase %
1	Bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan	Ya	4	26
		Cukup	11	74
		Tidak	0	0
		Total	15	100
2	Bantuan membantu proses produksi lebih cepat	Ya	15	100%
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
		Total	15	100%
3	Pendapatan anggota meningkat dari sebelumnya	Ya	15	100%
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
		Total	15	100%
4	Bantuan memberi manfaat	Ya	15	100%
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
		Total	15	100%
5	Bantuan digunakan dengan baik	Ya	15	100%
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
		Total	15	100%

Sumber : Data diolah (2026)

Dari hasil wawancara kesesuaian bantuan yang diberikan dengan kebutuhan sebanyak 26% anggota menilai bahwa bantuan sudah sesuai seperti permintaan. Anggota menggunakan sarana yang diberikan dengan baik. 74% anggota merasa bantuan cukup sesuai disebabkan salah satu sarana bantuan yang diberikan tidak sesuai. Kukusan yang dilampirkan didalam foto proposal kelompok merupakan kukusan berkapasitas besar, sementara, kukusan yang diberikan berkapasitas kecil yang tidak mampu menampung adonan kerupuk yang dibuat. Sehingga kukusan tersebut tidak digunakan. Selain itu, anggota yang memegang mesin penggilingan merasa bahwa mesin penggilingan memudahkan kerja. Namun hasil kerupuk dari penggilingan mesin tersebut berwarna lebih gelap sehingga produk terlihat kurang menarik. Selain itu, anggota beralih ke alat pemotong kerupuk yang dibeli mandiri karena penggunaan pisau dinilai cukup lambat dalam menyelesaikan pekerjaan dan membutuhkan tenaga lebih ekstra. Seluruh anggota berharap ada bantuan lagi untuk melengkapi kebutuhan mereka dalam membeli alat penyimpanan udang seperti *cooler box* kapasitas besar. Sarana ini berfungsi untuk mempersiapkan ketersediaan stok udang saat hasil udang melimpah. Sehingga stok aman saat kondisi udang langka. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kelompok belum sepenuhnya mandiri sebab masih adanya ketergantungan akan bantuan pemerintah.

Meski demikian, seluruh anggota mengakui bahwa bantuan yang diberikan telah memberi manfaat. Dengan bantuan tersebut produksi kerupuk lebih cepat yang biasanya sehari

hanya dapat menyelesaikan 5 kg adonan kerupuk, dengan bantuan sarana yang diberikan terutama blender membantu kegiatan lebih cepat. Sehingga dalam sehari anggota dapat membuat 20 kg adonan. Produksi kerupuk udang di KTH Mangrove bervariasi tergantung kemampuan penjualan tiap anggota. Dalam sebulan setiap anggota mampu memproduksi kerupuk udang sebanyak 80 kg hingga 100 kg. Jumlah produksi ini tergantung dengan ketersediaan bahan baku udang yang merupakan produk musiman. Hal ini sesuai dengan pendapat Lillah Zulfidha et al., (2024) bahwa Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari perubahan sebelum dan setelah program berjalan

Peningkatan produksi setelah adanya bantuan membuat meningkatnya pendapatan anggota. Harga pasaran kerupuk udang yang dijual Rp. 75.000,- per kilogram. Harga ini mengikuti harga pasaran yang disepakati anggota. Kerupuk udang ini tidak dipasarkan anggota karena konsumen dan pelanggan sendiri yang datang ke rumah untuk membeli dalam skala kecil hingga besar. Pelanggan kerupuk udang KTH ini berasal dari kelurahan sekitar, ke provinsi hingga sampai ke Malaysia yang dibawa dalam bentuk oleh-oleh. Usaha kerupuk udang yang ditekuni anggota dapat memenuhi kebutuhan harian rumah tangga hingga dapat digunakan menunaikan ibadah umroh. Usaha ini telah membantu meningkatkan pemberdayaan wanita.

Seluruh anggota menggunakan bantuan ini dengan baik. Sarana yang digunakan masih berfungsi dan digunakan hingga saat ini. Namun, Sarana seperti pisau tidak digunakan karena diganti dengan alat potong kerupuk yang membantu pekerjaan lebih mudah dan cepat. Selain itu, salah satu anggota mengaku tidak menggunakan kompor gas yang diberikan karena dianggap lebih boros gas. Hal ini menjadi pertimbangan untuk menekan biaya produksi kerupuk udang.

Berdasarkan kelola usaha dapat tergambarkan bahwa ekonomi anggota telah berdaya dengan besarnya produksi dan pendapatan anggota tiap bulannya. Meskipun dalam beberapa hal masih terdapat sedikit ketidaksesuaian bantuan yang diberikan dari pihak BKSDA Jambi. Selain itu, tingkat kemandirian kelompok dinilai belum sepenuhnya optimal karena sebagian anggota masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Peran pendamping sangat penting dalam melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Annisa dan Syafril (2025) bahwa program yang hanya berhenti pada penyaluran bantuan tanpa pendampingan dinilai kurang efektif. Sesuai dengan prinsip keberdayaan dan kemandirian, pendampingan berupaya mengembangkan keberdayaan anggota, menciptakan kemandirian dan menghindarkan dari ketergantungan (Septiarti et al., 2024). Dengan demikian diharapkan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri yang berakhir pada berdayanya anggota kelompok.

3.1.3 Kelola Kawasan

Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (Yumantoko, 2022). Bantuan KTH yang diberikan sekurangnya menambah partisipasi kelompok dalam menjaga kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. Adanya kesepakatan konservasi yang ditandatangani Lurah Nipah Panjang I dan BKSDA Jambi menunjukkan bahwa bantuan KTH yang diberikan tidak serta merta dapat membantu menumbuhkan pemberdayaan ekonomi masyarakat saja, tapi berdaya dalam berpartisipasi menjaga kawasan dan mengurangi ketergantungan akan kawasan. Sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan adanya penurunan tindak illegal di dalam kawasan CAHBPT.

Tabel 3. Hasil analisis Indikator Kelola Kawasan KTH Mangrove

No	Pernyataan	Jawaban	Individu (Jumlah)	Persentase %
----	------------	---------	-------------------	--------------

1	Saya mengetahui bahwa anggota harus ikut menjaga kawasan	Ya	15	100
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
Total			15	100
2	Saya memahami manfaat Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur bagi masyarakat	Ya	15	100
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
Total			15	100
3	Saya ikut kegiatan menjaga kawasan	Ya	3	20
		Cukup	12	80
		Tidak	0	0
Total			15	100
4	Saya ikut mengingatkan masyarakat untuk menjaga Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur	Ya	15	100
		Cukup	0	0
		Tidak	0	0
Total			15	100

Sumber : Data diolah (2026)

Anggota KTH Mangrove merupakan kelompok yang beranggotakan perempuan. Sebagian suami anggota kelompok terlibat dalam kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan CAHBPT. Kondisi ini membentuk hubungan tidak langsung antara anggota kelompok dan pengelolaan kawasan. Berdasarkan hasil wawancara, 100% anggota merasa memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga kawasan CAHBPT karena diberikannya bantuan tersebut. Anggota juga memahami manfaat keberadaan CAHBPT bagi masyarakat seperti melindungi dari banjir dan tempat satwa seperti udang tinggal dan bertelur. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota memiliki pengetahuan yang baik mengenai fungsi kawasan konservasi dan pentingnya pelestarian kawasan konservasi.

Pada indikator partisipasi anggota dalam mendukung kegiatan menjaga kawasan, 80% responden cukup sering berpartisipasi dan 20% menyatakan ikut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anggota belum sepenuhnya dilakukan dalam kegiatan terkait konservasi secara langsung. Partisipasi masyarakat terhadap kelestarian hutan konservasi didukung dari pemahaman masyarakat terhadap informasi konservasi (Purwatiningsih, 2022). Berdasarkan penuturan ketua kelompok, partisipasi dalam kegiatan konservasi yang dilakukan ibu-ibu secara langsung biasanya dalam bentuk menyediakan makanan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKSDA Jambi, ikut serta ke pondok kerja dalam kegiatan pemulihan ekosistem dan membantu dalam penyediaan konsumsi untuk suami yang merupakan anggota kelompok pemulihan ekosistem. Selain itu, kurangnya keterlibatan langsung menurut anggota karena lokasi kawasan cukup jauh ditempuh dan harus menggunakan akses transportasi air.

Meski kurang terlibat secara langsung, semua anggota menyatakan ikut berpartisipasi mengingatkan masyarakat sekitarnya untuk menjaga kawasan CAHBPT. Hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran anggota dalam menjaga kelestarian kawasan dengan pendekatan sosial di lingkungan sekitar. Peran tersebut merupakan partisipasi tidak langsung yang turut mendukung upaya konservasi kawasan.

3.1.4 Efektivitas berdasarkan 3 indikator penilaian

Berdasarkan hasil analisis 3 indikator efektivitas bantuan usaha ekonomi produktif, dihitung jumlah dan rata-rata skor untuk menilai apakah setiap indikator penilaian masuk dalam kategori tidak efektif, cukup efektif atau efektif sebagai berikut:

Tabel 4. Efektivitas bantuan Usaha Ekonomi Produktif di KTH Mangrove

No	Aspek Pengelolaan	Total Skor	Jumlah Indikator	Rata-rata Skor	Kategori
1.	Pengelolaan Kelembagaan	163	4	40,75	Efektif
2.	Pengelolaan Usaha	214	5	42,8	Efektif
3.	Pengelolaan Kawasan	168	4	42	Efektif

Sumber : Data diolah (2026)

Keterangan :

15-25 = Tidak Efektif

26-35 = Cukup Efektif

36-45 = Efektif

Berdasarkan hasil wawancara menggunakan skala likert, aspek kelola kelembagaan memperoleh rata-rata skor sebesar 40,75, kelola usaha sebesar 42,8 dan kelola kawasan sebesar 42. Ketiga aspek tersebut berada pada interval 36-45 sehingga masuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan usaha ekonomi produktif pada KTH Mangrove mampu memberdayakan anggota dalam partisipasi kelembagaan kelompok, Peningkatan pendapatan dan usaha, serta partisipasi dalam perlindungan kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. Hal ini sesuai dengan pendapat Lillah Zulfidda et al., (2024), yang menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi memiliki manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial.

2). Kendala Dalam Pemanfaatan Bantuan KTH

Dalam pemanfaatan bantuan usaha ekonomi produktif, kelompok masih menghadapi beberapa kendala terutama dalam ketersediaan bahan baku utama dan meningkatnya biaya produksi. Ketersediaan udang sebagai bahan baku utama tergantung musiman sehingga sulit diperoleh pada waktu tertentu. Harga bahan baku seperti udang, tepung dan plastik mengalami kenaikan. Harga udang Rp. 20.000,- per kilogram naik menjadi Rp.25.000,- per kilogram. Harga plastik mengalami kenaikan dua kali lipat dari Rp.30.000,- per kilogram menjadi Rp.60.000,- per kilogram. Kenaikan harga bahan produksi yang merupakan dampak dari kenaikan harga minyak dunia ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan mempengaruhi keuntungan anggota kelompok.

Mengatasi kendala tersebut, anggota kelompok sepakat melakukan penyesuaian harga jual produk secara bertahap. Tujuannya untuk menutupi biaya produksi tanpa menurunkan daya beli konsumen. Disisi lain, kelompok masih memiliki ketergantungan akan bantuan pemerintah untuk memenuhi kekurangan sarana produksi penyimpanan bahan baku (*Cooler box*). Tujuannya untukantisipasi menjaga ketersediaan stok udang saat musim tangkapan melimpah. Fluktuasi harga bahan baku dan keterbatasan teknologi produksi merupakan faktor penghambat dalam usaha kerupuk udang di kelurahan Nipah Panjang (Asyani et al., 2026). Faktor tersebut juga menjadi kendala pada usaha kerupuk udang KTH Mangrove. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi

psikologis dan mentalitas masyarakat itu sendiri. Sehingga peran pendamping selaku motivator penting dalam meningkatkan keberdayaan anggota.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Program bantuan Usaha Ekonomi Produktif pada KTH Mangrove dilaksanakan melalui pemberian bantuan sarana produksi usaha kerupuk udang. Program usaha yang telah berjalan sejak tahun 2022 ini disertai dengan pendampingan, monitoring dan evaluasi kelompok secara berkala. Program bantuan ini menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Penilaian ini ditinjau dari aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek kawasan.

Bantuan yang diberikan mampu memperkuat kelembagaan kelompok, membantu meningkatkan kapasitas produksi serta mendukung peningkatan pendapatan anggota dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota dalam pelestarian Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur. Namun, kelompok masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan bahan baku udang, meningkatnya biaya produksi dan ketergantungan anggota akan bantuan. Oleh karena itu diperlukan pendampingan yang berkelanjutan agar timbulnya kemandirian anggota KTH Mangrove dalam memenuhi kebutuhan usahanya.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada KTH Mangrove agar kemampuan anggota dalam mengelola kelembagaan, usaha dan kawasan dapat terus meningkat serta mendorong terciptanya kemandirian kelompok. Selain itu, kelompok perlu mengembangkan strategi dalam penyediaan bahan baku udang agar lebih stabil baik dengan kerja sama dengan nelayan dan setempat dan pengalokasian dana kas untuk penyediaan sarana penyimpanan udang. Sehingga proses produksi kerupuk udang dapat berjalan tanpa kendala musim. Terakhir, BKSDA Jambi diharapkan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi Produktif guna memantau keberlanjutan usaha. Selain itu, ikut melibatkan kelompok dalam kegiatan terkait pelestarian CAHBPT baik secara langsung maupun tidak untuk meningkatkan partisipasi kelompok terhadap kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A., & Syafril, R. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Tani Kopi Bantjah Di Kelurahan Limau Manis Selatan. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 345–354.
- Asyani, N., Yusuf, M., & Prasaja, A. S. (2026). Strategi Pemasaran Kerupuk Udang Industri Rumahan Di Kecamatan Nipah Panjang. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 1347–1357.
- Elwardah, K., & Fryanti, Y. E. (2023). *Model Pemberdayaan Komunitas Nelayan Berbasis UMKM Unit Pengolahan Ikan Melalui BMT - Rajawali Pers*. Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=SdFzEQAAQBAJ>
- Galvanis, W. J., Anwar, K., & Suhermanto, A. (2024). Strategi Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Berbasis Sosial Ekonomi di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 533–544.
- Gustina Hidayat, I. K. (2026). *Manajemen Keuangan Berkelanjutan: untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. PENERBIT KBM INDONESIA. <https://books.google.co.id/books?id=I2zJEQAAQBAJ>

- Idris, F., Mukhrijal, M., & Rassanjani, S. (2023). Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(2).
- Junwalki, J., Panggabean, D., & Malau, A. G. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Alang-Alang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1022–1033.
- Lillah Zulfidda, Z., P Lubis, D., & Sadono, D. (2024). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Kemitraan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember. *Sosio Konsepsia*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.33007/ska.v13i2.3328>
- Munthe, L., & Astuti, T. (2024). Kinerja Kelompok Tani Hutan (Kth) Karya Lestari Dalam Pengelolaan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (Iuphkm) Di Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipanganbolon Kabupaten Simalungun. *Jurnal Akar (Aspirasi Karya Anak Bangsa)*, 3(1), 19–32.
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. *Global Eksekutif Teknologi*, 7.
- Nasution, A. R., & Satria, L. P. (2025). The effectiveness of social assistance programs in reducing poverty in Bandar Khalifah Village. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2909–2920.
- Nurmayanti, S., Nainggolan, H. L., Nurhayati, H. N., Novianto, U., Ilham, B., Dewi, P. P., Harinie, L. T., Cahyaningrum, D., Hina, H., & Astina, C. (2025). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: TEORI DAN PRAKTIK*. CV. Intelektual Manifes Media. <https://books.google.co.id/books?id=K8dGEQAAQBAJ>
- Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KUM.1/5/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam Rangka Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Ditjen KSDAE (2017).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan (2018).
- Purwatiningsih, S. D. (2022). Pemahaman masyarakat sekitar hutan pada informasi konservasi hutan dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1).
- Rafi'e, M., Setiawan, I., & Noorrahman, M. F. (2026). Efektivitas Program Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian (Psp) Dinas Pertanian Di Kecamatan Danau Panggang (Studi Kasus: Desa Manarap Hulu Dan Desa Darussalam). *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 3(1), 171–182.
- Septiarti, S. W., Candra, K. I., Marpaung, A. H., Wafiroh, N., Matdoan, S., Trissianti, F. A. D., Ningrum, I. H., & Hermawan, Y. (2024). *Pendampingan Masyarakat*. Bayfa Cendekia Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=y_AYEQAAQBAJ
- Yumantoko. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB. *Sosio Konsepsia*, 11(02), 364–378. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3076>